

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung (Kantor Daerah/00504) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung (Kantor Daerah/00504). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pekanbaru, 12 Juli 2019
Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru,

dto

Samsir Toona, S.H.I.
NIP. 19780312 200312 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	60
VI. Lampiran dan Daftar	



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I-A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : 402072.papbr@gmail.com

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru selaku Kordinator Wilayah Riau (UAPPA-W/BA 00504/KD) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I TA 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru,

dto

Samsir Toona, S.H.I.

NIP. 19780312 200312 1 003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) Semester I TA 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah berupa Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp314.819.268 atau mencapai 131,72 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp239.006.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp612.933.643 atau mencapai 53,72 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.140.990.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp82.393.845 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp82.393.845; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp50.924.000 dan Rp31.469.845.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp314.819.268, sedangkan jumlah beban dari kegiatan

operasional adalah sebesar Rp634.507.035 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp319.687.767. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp319.687.767.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp53.043.237 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp319.687.767 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai -Rp266.644.530 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp298.114.375 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp31.469.845.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU/KORDINATOR WILAYAH RIAU
(UAPPA-W 00504/KD)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		%	TA 2018 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	239.006.000	314.819.268	131,7	218.781.960
JUMLAH PENDAPATAN		239.006.000	314.819.268	131,7	218.781.960
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.140.990.000	612.933.643	53,7	567.142.076
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		1.140.990.000	612.933.643	53,7	567.142.076

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU/KORDINATOR WILAYAH RIAU (UAPPA-W 00504/KD)

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	50.924.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di muka (prepaid)	C.8	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	31.469.845	53.043.237
Persediaan yang Belum Diregister	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		82.393.845	53.043.237
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	-	-
Peralatan dan Mesin	C.17	-	-
Gedung dan Bangunan	C.18	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.23	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.24	-	-
Aset Lain-Lain	C.25	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.26	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.27	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		82.393.845	53.043.237

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.28	50.924.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.29	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.31	-	-
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C.32	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.33	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.34	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50.924.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		50.924.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.35	31.469.845	53.043.237
JUMLAH EKUITAS		31.469.845	53.043.237
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		82.393.845	53.043.237

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU/KORDINATOR WILAYAH RIAU
(UAPPA-W 00504/KD)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	314.819.268	218.781.960
JUMLAH PENDAPATAN		314.819.268	218.781.960
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	21.573.392	15.029.580
Beban Barang dan Jasa	D.4	229.140.300	134.087.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan	D.6	383.793.343	433.055.076
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		634.507.035	582.171.656
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(319.687.767)	(363.389.696)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(319.687.767)	(363.389.696)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(319.687.767)	(363.389.696)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU/KORDINATOR WILAYAH RIAU (UAPPA-W 00504/KD) LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	53.043.237	44.862.010
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(319.687.767)	(668.718.614)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3a	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
SELISIH NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	298.114.375	676.899.841
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(21.573.392)	8.181.227
EKUITAS AKHIR	E.5	31.469.845	53.043.237

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
	3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
	4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
	5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
	6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 658/PB/2017 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 617/PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Semester I TA 2019 (UAPPA-W Semester I TA 2018)

Pengadilan Agama Pekanbaru/Kordinator Wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tersebut mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Riau. Melalui peran Pengadilan Agama Pekanbaru selaku Kordinator Wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru/Kordinator Wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) berkomitmen dengan visi:

“Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru selaku Kordinator Wilayah (UAPPAW BA 00504/KD) melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru/Kordinator Wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) Semester I TA 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pekanbaru selaku Kordinator Wilayah Riau. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru/Kordinator Wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) Semester I TA 2019 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Pengadilan Agama Pekanbaru yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup UAPPAW Provinsi Riau pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (00504/KD) adalah 13 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	-	1	-	-	1
2	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA RENGAT	-	1	-	-	1
3	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	-	1	-	-	1
4	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	-	1	-	-	1
5	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	-	1	-	-	1
6	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	-	1	-	-	1
7	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	-	1	-	-	1
8	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA DUMAI	-	1	-	-	1
9	00504 0900 KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	-	1	-	-	1
10	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	-	1	-	-	1

11	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	-	1	-	-	1
12	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	-	1	-	-	1
13	00504 0900 KD	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	-	1	-	-	1

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan

Pengadilan Agama Pekanbaru selaku koordinator wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I TA 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru selaku koordinator wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Pekanbaru selaku koordinator wilayah Riau (UAPPA-W 00504/KD) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	35.000	35.000
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	6.308.000	6.308.000
Pendapatan Ongkos Perkara	159.520.000	159.520.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	73.143.000	73.143.000
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0
Jumlah Pendapatan	239.006.000	239.006.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.140.990.000	1.140.990.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	1.140.990.000	1.140.990.000

Realisasi

Pendapatan

Rp314.819.26

8

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp314.819.268 atau mencapai 131,72 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp239.006.000. Pendapatan di lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	35.000	1.585.000	4.528,57
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	6.308.000	9.717.000	154,04
Pendapatan Ongkos Perkara	159.520.000	145.910.000	91,47
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	73.143.000	157.526.700	215,37
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	80.568	0
Jumlah	239.006.000	314.819.268	131,72

Realisasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan Semester I TA 2019 mengalami penurunan sebesar -32,11% dibandingkan realisasi Semester I TA 2018. Hal ini disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan. Terdapat kenaikan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan sebesar 42,62% dibandingkan dengan Semester I TA 2018 yang disebabkan meningkatnya Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan. Terdapat kenaikan Pendapatan Ongkos Perkara sebesar 8,81% dibandingkan dengan Semester I TA 2018 yang disebabkan meningkatnya Pendapatan Ongkos Perkara. Terdapat kenaikan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar 108,87% dibandingkan dengan Semester I TA 2018 yang disebabkan meningkatnya Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Terdapat kenaikan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar 36,59% dibandingkan dengan Semester I TA 2018 yang disebabkan meningkatnya Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2019
dan 2018*

Uraian	Realisasi Semester I TA 2019	Realisasi Semester I TA 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	1.585.000	2.335.000	-32,11
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	9.717.000	6.813.000	42,62

Pendapatan Ongkos Perkara	145.910.000	134.090.000	8,81
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	157.526.700	75.416.900	108,87
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	80.568	127.060	36,59
Jumlah	314.819.268	218.781.960	43,90

Realisasi

Belanja

Negara

Rp 612.933.643

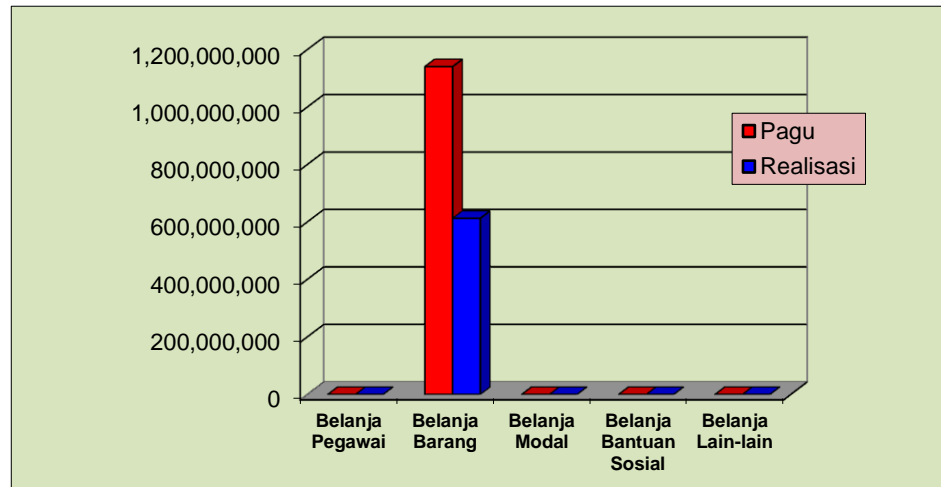
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester I TA 2019 adalah sebesar Rp612.933.643 atau 53,72% dari anggaran belanja sebesar Rp1.140.990.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2019 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester I TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.140.990.000	612.963.643	53,72
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	1.140.990.000	612.963.643	53,72
Pengembalian Belanja	-	30.000	-
Jumlah	1.140.990.000	612.933.643	53,72

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Semester I TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,07% dibandingkan realisasi belanja pada Semester I TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada Semester I TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Semester I TA 2019	Realisasi Semester I TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	612.933.643	567.142.076	8,07
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	612.933.643	567.142.076	8,07

Belanja

Pegawai Rp 0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2018 dan Semester I TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja

Barang

Rp 612.933.643

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp612.933.643 dan Rp567.142.076. Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2019 mengalami kenaikan 8,07% dari Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya pengadaan barang/jasa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

Perbandingan Belanja Barang Semester I Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Semester I TA 2019	Realisasi Semester I TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	-	2.850.000	-100,00
Belanja Barang Non Operasional	91.228.000	49.857.000	82,98
Belanja Jasa	137.942.300	81.520.000	69,21
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	383.793.343	433.055.076	-11,38
Jumlah Belanja Kotor	612.963.643	567.282.076	8,05
Pengembalian Belanja Barang	30.000	140.000	-78,57
Jumlah	612.933.643	567.142.076	8,07

*Belanja
Modal Rp 0*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2019 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00% dibandingkan Semester I TA 2018 disebabkan oleh tidak terdapatnya alokasi belanja aset penunjang tugas pokok dan fungsi instansi.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I TA 2019 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen dibandingkan Semester I TA 2018. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi dana untuk pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2019 adalah sebesar Rp0, mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen bila dibandingkan dengan Semester I TA 2018 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapatnya alokasi pengadaan peralatan dan mesin untuk menunjang pelaksanaan tupoksi instansi.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi belanja gedung dan bangunan Semester I TA 2019 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen yang berasal dari tidak terdapatnya alokasi pengadaan gedung dan bangunan penunjang kegiatan tupoksi instansi.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Semester I TA 2019 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan jaringan dalam rangka mendukung rencana strategis.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Semester I TA 2019 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen dibandingkan Semester I TA 2018. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi pengadaan aset tetap lainnya/aset lainnya untuk penunjang pelaksanaan rencana strategis instansi.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp 0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2019 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00% dibandingkan Semester I TA 2018. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial misalnya rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 50.924.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Semester I TA 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp50.924.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Semester I TA 2019	Tahun Anggaran 2018
Uang Tunai	50.924.000	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	50.924.000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

dan Setara

Kas Rp 0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNB **C.4 Piutang PNB**

Rp 0

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian

Lancar

TP/TGR Rp0

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian

Lancar TPA

Rp 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar Semester I Tahun 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp 0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Uang Muka
Belanja Rp 0*

C.9 Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima.

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp 0*

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan.

*Persediaan
Rp.31.469.845*

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp31.469.845 dan Rp53.043.237.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 30 Juni 2019

dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I Tahun 2019 dan 2018

Jenis	Semester I TA 2019	Tahun Anggaran 2018
Barang Konsumsi	31.469.845	53.043.237
Jumlah	31.469.845	53.043.237

*Persediaan
yang Belum
Diregister*

Rp 0

C.12 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan yang Belum Diregister seharusnya tidak boleh ada pada laporan keuangan tahunan.

*Tagihan
TP/TGR Rp 0*

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp 0*

C.14 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp 0*

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Semester I Tahun 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp 0

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah pada satker lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	-
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2019	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	Rp	-

*Peralatan
dan Mesin
Rp 0*

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	-
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2019	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	Rp	-

*Gedung dan
Bangunan
Rp 0*

C.18 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	-
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2019	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	Rp	-

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp 0*

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	-
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2019	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	Rp	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 0*

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	-
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2019	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	Rp	-

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp 0*

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada satker lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp 0*

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

*Aset Tetap
yang Belum
Diregister
Rp 0*

C.23 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap yang Belum Diregister bisa timbul ketika tidak tercatatnya data BMN di aplikasi SIMAKBMN sehingga data keuangan dan data barang berbeda.

*Aset Tak
Berwujud
Rp 0*

C.24 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-
Lain Rp 0*

C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Termasuk Aset Lain-Lain antara lain Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional satker lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	-
Mutasi Tambah		
Reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi Kurang		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
Penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2019	Rp	-
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2019	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	Rp	-

*Aset Lainnya
yang Belum
Diregister
Rp 0*

C.26 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Nilai Aset Lainnya yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya yang Belum Diregister seharusnya tidak boleh ada pada laporan keuangan tahunan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 0*

C.27 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Hak Cipta	-	-	-
Royalti	-	-	-
Software	-	-	-
Lisensi	-	-	-
Hasil Kajian / Penelitian	-	-	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-
Aset Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp 50.924.000*

C.28 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp50.924.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

Uraian	Nilai
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	7.000.000,0
PENGADILAN AGAMA RENGAT	8.300.000,0
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	-
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	6.000.000,0
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	10.250.000,0
PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	6.000.000,0
PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	-
PENGADILAN AGAMA DUMAI	5.974.000,0
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	-
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	-
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	-
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	7.000.000,0
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	400.000,0
Jumlah	50.924.000,0

*Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp 0*

C.29 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp 0*

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

*Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp 0*

C.31 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan antara lain utang yang belum

diterima tagihannya.

Hibah

C.32 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan

*Langsung
Yang Belum
Disahkan*

Hibah Yang Langsung Belum Disahkan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban entitas satker yang menerima hibah untuk mengajukan pengesahan kepada BUN pengelola hibah.

Rp 0

Utang

C.33 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan*

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp 0

Bila pada akhir periode pelaporan terdapat kelebihan pembayaran pajak/ PNBPN, namun pengembalian pajak/PNBPN tersebut belum direalisasikan, maka satuan kerja mencatatnya sebagai utang kelebihan bayar pajak/PNBPN.

Utang

C.34 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Jangka
Pendek
Lainnya Rp 0*

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Ekuitas

C.35 Ekuitas

Rp 31.469.845

Saldo Ekuitas per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp31.469.845 dan Rp53.043.237. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Rp314.819.268 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp314.819.268 dan Rp218.781.960. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Semester I TA 2019	Realisasi Semester I TA 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	1.585.000	2.335.000	-32,11
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	9.717.000	6.813.000	42,62
Pendapatan Ongkos Perkara	145.910.000	134.090.000	8,81
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	157.526.700	75.416.900	108,87
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	80.568	127.060	36,59
Jumlah	314.819.268	218.781.960	43,90

Beban Pegawai Rp 0 **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban

Persediaan

Rp 21.573.392

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp21.573.392 dan Rp15.029.580. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	Semester I TA 2019	Semester I TA 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	21.573.392	15.029.580	43,54
Jumlah	21.573.392	15.029.580	43,54

Beban

Barang dan

Jasa

Rp 229.140.300

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp229.140.300 dan Rp134.087.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	Semester I TA 2019	Semester I TA 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	-	2.850.000	-100,00
Beban Barang Non Operasional	91.198.000	49.717.000	83,43
Beban Jasa Konsultan	137.942.300	81.520.000	69,21
Jumlah	229.140.300	134.087.000	70,89

*Beban
Pemeliharaan
Rp 0*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp 383.793.343*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp383.793.343 dan Rp433.055.076. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2019
dan 2018*

URAIAN	Semester I TA 2019	Semester I TA 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	150.361.343	277.456.076	-45,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233.432.000	155.599.000	50,02
Jumlah	383.793.343	433.055.076	-11,38

*Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 . Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp 0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus dari

D.11 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non

Operasional

Rp 0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Defisit Pos

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Luar Biasa

Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp 53.043.237 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp53.043.237 dan Rp44.862.010.

Defisit LO Rp **E.2 Surplus (Defisit) LO**

(319.687.767) Jumlah Surplus(Defisit) LO untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar -Rp319.687.767 dan -Rp668.718.614. Surplus(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar Rp0 **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0 **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp 0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp 0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap
Non
Revaluasi
Rp 0*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-
lain Rp 0*

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi
Antar Entitas
Rp 298.114.375

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp298.114.375 dan Rp676.899.841. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

No	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	612.933.643
2	Diterima dari Entitas Lain	(314.819.268)
3	Transfer Keluar	-
4	Transfer Masuk	-
5	Pengesahan Hibah Langsung	-
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
7	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	-
Jumlah		298.114.375

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga tanggal 30 Juni 2019, DDEL sebesar - Rp314.819.268 sedangkan DKEL sebesar Rp612.933.643.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0 yang merupakan transfer aset ke kantor daerah.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018
Rp 29.832.430 adalah masing-masing sebesar Rp31.469.845 dan Rp53.043.237.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada lingkup Pengadilan Agama Propinsi Riau/UAPPA-W (BA 00504/KD) terdapat penambahan dua satuan kerja baru yaitu Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Agama Taluk Kuantan dengan Pejabat Pengelola Anggaran sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	Kuasa Pengguna Anggaran	Randi Susatrio, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Hendra Masputra, S.Kom., M.H.
	Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Januardi, S.Kom., M.H.
	Bendahara	Hermawandi, S.H.I.
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	Kuasa Pengguna Anggaran	Hera Venriko, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Hera Venriko, S.E.
	Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Febra Kurniawan Nur, S.H.
	Bendahara	Widia Eka Putri, S.H.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama di lingkup Pengadilan Agama Propinsi Riau/UAPPA-W (BA 00504/KD) adalah :

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SATUAN KERJA PADA WILAYAH RIAU
PERIODE 30 JUNI 2019**

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES 1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK / KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	TANGGAL IZIN REKENING	TNP / NON TNP	SALDO PER 30 JUNI 2019
WILAYAH RIAU											
1	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	655838639	BPG 008 PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (402073)	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)	S-082/ WPB.04/ KP.008/ 2018	08 Januari 2018	TNP	0
2	PENGADILAN AGAMA RENGAT	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0284.01.000727.30.3	BPG 092 PENGADILAN AGAMA RENGAT	BANK RAKYAT INDONESIA	S-206/WBP.04/KP.092/ 2015	12 Februari 2015	TNP	0
3	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0175.01.000548.30.4	BPG 092 PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	BANK RAKYAT INDONESIA	S-258/WBP.04/KP.092/ 2015	24 Februari 2015	TNP	0
4	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0268.01.000612.30.4	BPG 008 Pengadilan Agama Bangkinang	BRI Cabang Bangkinang	S-2697/WPB.04/KP.008/ 2015	11 September 2015	TNP	0
5	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0189-01-000339-30-6	BPg 120 Pengadilan Agama Bengkalis	BRI (002) BENGKALIS	S-370/WPB.04/KP.120/ 2015	26 Februari 2015	NON TNP	0
6	PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	1099-01-000034-30-6	BPg 008 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	BRI Cabang Pasir Pengaraian	S-797/ WPB.04/ KP.008/ 2015	04 Maret 2015	TNP	0
7	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0171.01.000120.30-4	BPg 120 Pengadilan Agama Selatpanjang	BRI Cabang Selat Panjang	S-307/ WPB.04/KP.120/ 2015	13 Februari 2015	TNP	0
8	PENGADILAN AGAMA DUMAI	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0159-01-000620-30-0	BPG 120 Pengadilan Agama Dumai	BRI Cabang Dumai	S-496/WPB.04/ KP.120/ 2015	17 Maret 2015	TNP	0
9	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	MAHKAMAH AGUNG (005)	01	GIRO	017001001806307	BPG 008 PTA PEKANBARU 04	PT. BANK BRI CABANG PEKANBARU	S-909/WPB.04/ KP.008/ 2015	17 Maret 2015	TNP	0
10	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	119001000436306	BPG 008 PA SIAK 403402	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Siak	S-090/ WPB.04/ KP.008/ 2019	16 Januari 2019	TNP	0
11	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	1042099248	BPG 092 PA TELUK KUANTAN 03	BRI Syariah Cabang Teluk Kuantan	S-05/WPB.04/KP.03.03/ 2019	03 Januari 2019	TNP	0
12	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0622-01-000120-30-3	BPg 008 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	BRI Cabang Pangkalan Kerinci	S-745/WBP.04/KP.008/ 2015	26 Februari 2015	TNP	0
13	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	000201000370302	BPg 120 Pengadilan Agama Ujung Tanjung (04)	BRI Cabang Bagan Siapi-api	S-286/WPB.04/KP.120/ 2015	25 Februari 2015	TNP	0

**DAFTAR REKENING LAINNYA SATUAN KERJA PADA WILAYAH RIAU
PERIODE 30 JUNI 2019**

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES 1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK / KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	TANGGAL IZIN REKENING	TNP / NON TNP	SALDO PER 30 JUNI 2019
WILAYAH RIAU											
1	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	1037321261	RPL 008 PDT PA PKU UNTUK BY PERKARA	BANK BRI Syariah	S-2084/WPB.04/KP.008/2018	19 September 2018	TNP	256.070.265,30
2	PENGADILAN AGAMA RENGAT	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0284.01.001421.30.8	RPL 092 PDT PA RENGAT UNTUK MENAMPUNG BIAYA PERKARA	BANK RAKYAT INDONESIA	605/WPB.04/KP.0303/2018	03 Desember 2018	TNP	128.523.531
3	PENGADILAN AGAMA TEMBLAHAN	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	7778006008	RPL 092 PDT MENAMPUNG BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA TEMBLAHAN	BANK SYARIAH MANDIRI	S-2635/MK.5/ 2018	06 Desember 2018	TNP	84.614.000
4	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	2018120869	RPL 008 PDT PA BKN untuk biaya perkara	BNI SYARIAH Cabang Flamboyan-Bangkinang	S-2889/WPB.04/KP.008/2018	10 Desember 2018	TNP	162.924.000
5	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	7085622999	RPL 120 PA Bengkalis Utk Biaya Perkara	BANK SYARIAH MANDIRI	S-2637/MK.5/2015	01 April 2015	NON TNP	132.554.000
6	PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	7085830095	RPL 008 PA P. Pengaraian By Perkara	Bank Syariah Mandiri Pasir Pengaraian	S-2653/MK.5/2015	01 April 2015	TNP	54.043.725
7	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	7103998877	RPL 120 PA Slip Utk PDT Perkara	Bank Syariah Mandiri	S-8953/MK.5/2015	07 November 2016	TNP	11.262.000
8	PENGADILAN AGAMA DUMAI	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	7009037734	RPL 120 PA DUMAI Utk Biaya Perkara	Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai	S-2781/MK.5/2015	07 April 2015	TNP	122.949.462,87
9	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	017001002531303	RPL 008 PTA PEKANBARU Untuk PDT Biaya Perkara	PT. BANK BRI CABANG PEKANBARU	S-5021/MK.5/2015	12 Juni 2015	TNP	1.350.000
10	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	119001000439304	RPL 008 PDT PA SIAK UNTUK BY PERKARA	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Siak	S-091/WPB.04/KP.008/2019	16 Januari 2019	TNP	72.391.000
11	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	1042099313	RPL 092 PDT PA TLK UTK BIAYA PERKARA	BRI Syariah Cabang Teluk Kuantan	S-04/WPB.04/KP.03.03/2019	03 Januari 2019	TNP	33.579.000
12	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0641706641	RPL 008 PA Pangkalan Kerinci utk Biaya Perkara	BANK BNI Syariah	S-746/WBP.04/KP.008/2015	15 April 2015	TNP	43.235.000
13	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	MAHKAMAH AGUNG (005)	04	GIRO	0002-01-000374-30-6	RPL 120 PA Ujung Tanjung Utk Biaya Perkara	BRI Cabang Bagan Siapi-api	S-3114/MK.5/2015	16 April 2015	TNP	62.194.000

**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU/KORDINATOR WILAYAH
PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU (UAPPA-W 00504/KD)**

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2019	Per 30-06-2019	Per 30-06-2019	Per 30-06-2019
A	Tanah						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	-	-	-
2	Alat Kantor	-	-	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	-	-	-	-	-	-
5	Komputer Unit	-	-	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	-	-	-	-	-	-
7	Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	-	-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
E	Konstruksi dalam Pengerjaan						
1	KDP Bangunan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian	-	-	-	-	-	-
2	Buku dan Koleksi Kepustakaan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-

*) Beban amortisasi

**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU/KORDINATOR WILAYAH
PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU (UAPPA-W 00504/KD)**

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No	Uraian	Lokasi	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
				-		-	
Jumlah				-		-	

Lampiran III : Daftar Hibah langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU/KORDINATOR WILAYAH
PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU (UAPPA-W 00504/KD)**

Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 30 Juni 2019

No	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
				-	-	-	
Jumlah				-	-	-	